
ANALISIS VALUE FOR MONEY PADA KINERJA KEUANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ROKAN HULU

M. Fauzan Putra¹

¹*Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Riau*

Email: m.fauzanputra@student.uir.ac.id

Nina Nursida²

²*Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Riau*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu menggunakan prinsip value for money. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan yang diperoleh berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Rokan Hulu tahun 2020 dan 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020 perhitungan ekonomis dengan nilai rasio sebesar 72% dikategorikan ekonomis, perhitungan efisien dengan nilai rasio sebesar 131% dikategorikan efisien, dan perhitungan efektivitas dengan nilai rasio sebesar 93% dikategorikan tidak efektifitas. Pada tahun 2021 perhitungan ekonomis dengan nilai rasio sebesar 93.32% dikategorikan ekonomis, perhitungan efisien dengan nilai rasio sebesar 101,77% dikategorikan efisien, dan perhitungan efektivitas dengan nilai rasio sebesar 59% dikategorikan tidak efektifitas. Dengan demikian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020 dan 2021 yang ditinjau dari elemen ekonomis, efisiensi, dan efektivitas belum memenuhi prinsip value for money.

Kata kunci : Ekonomis, efisiensi, efektivitas, value for money, kinerja

Abstract

This study aims to analyze the performance accountability of the Rokan Hulu District Environmental Office using the principle of value for money. The type of research used is qualitative research. The collection technique obtained was in the form of Performance Reports of Government Agencies at the Rokan Hulu Regency Environmental Service for 2020 and 2021. The results of this study indicate that in 2020 economical calculations with a ratio value of 72% are categorized as economical, efficient calculations with a ratio value of 131% are categorized as efficient, and effectiveness calculations with a ratio value of 93% are categorized as ineffective. In 2021 economic calculations with a ratio value of 93.32% are categorized as economical, efficient calculations with a ratio value of 101.77% are categorized as efficient, and effectiveness calculations with a ratio value of 59% are categorized as ineffective. Thus the performance of the Rokan Hulu Regency Environmental Service in 2020 and 2021 in terms of economic elements, efficiency and effectiveness has not fulfilled the principle of value for money.

Keywords: Economical, efficiency, effectiveness, value for money, performance

PENDAHULUAN

Di Indonesia akuntansi sektor publik telah berkembang pesat seiring dengan dilaksanakannya otonomi Dalam bidang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjelaskan bahwa ofmomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap organisasi sektor publik di masing-masing daerah memiliki kebebasan yang diberikan oleh hak otonomi

daerah untuk mengelola dan meningkatkan kinerjanya, agar tercapainya kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerahnya. Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Pengukuran kinerja dalam instansi pemerintahan yang bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi suatu instansi pemerintahan. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai capaian suatu strategi melalui tolak ukur kinerja yang ditetapkan. Pengukuran kinerja ini sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, efektif (konsep *value for money*) artinya bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus berdampak terhadap kepentingan dan kebutuhan publik sesuai dengan tuntutan publik, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Value for Money adalah konsep penting dalam organisasi sektor publik sehingga sering kali disebut inti dari pengukuran kinerja sektor publik. *Value for money* merupakan pokok Penting dalam pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Indikator *value for Money* mendasarkan pada tiga bagian utama, yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomis yakni analisis sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input *resources* yang digunakan untuk menghindari pemborosan dan pengeluaran yang tidak produktif. Efisien yaitu perbandingan input atau output dengan standar kinerja atau target yang telah ditentukan. Efektif adalah tingkat pencapaian hasil dari program dengan target yang telah ditetapkan. Secara sederhana, efektif adalah perbandingan outcome dengan output (Pratiwi & Nursandia, 2017).

Laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu instansi pemerintahan. Menurut (Amran Manurung & Sihombing, 2018) Laporan realisasi anggaran yang dipublikasikan pemerintah daerah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah. Jika dibandingkan dengan neraca, laporan realisasi anggaran menduduki sebagai prioritas yang lebih penting. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola dalam satu periode pelaporan. Salah satu instansi pemerintah adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu yang memiliki visi dan misi “Terwujudnya Kabupaten Rokan Hulu yang lebih maju dan berdayasaing dalam keragaman adat dan budaya berdasarkan nilai-nilai agama menuju masyarakat sejahtera serta Mewujudkan ketersediaan infrastruktur yang berimbang dengan membangun desa menata kota secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”. Setiap tahunnya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu membuat beberapa program serta kegiatan.

Berdasarkan laporan alokasi dan realisasi anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 terdapat beberapa program yang masih dibawah 80% yaitu program pelayanan administrasi perkantoran sebesar 53,76%, program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan sebesar 14,96%, program penanaman bambu pada kanan kiri sungai, sempadan danau dan daerah tangkapan air (DTA) sekitar mata air dan daerah imbuhan air tanah sebesar 77,6%.

Pada tahun 2021 terdapat 2 program yang masih dibawah 80% yaitu Program penanganan pengaduan lingkungan hidup sebesar 78,82%, dan program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional sebesar 74,27%.

Program yang mencapai realisasi anggaran tertinggi pada tahun 2020 adalah program peningkatan saran dan prasarana 99,5%, program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 98,03%, program pengadaan bangunan konservasi tanah dan air dengan persentase sebesar 95,22%. Sedangkan program dengan realisasi anggaran terendah pada tahun 2020 program pelayanan administrasi perkantoran sebesar 53,76%, program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan sebesar 14,96%. Kemudian Program yang mencapai realisasi anggaran tertinggi pada tahun 2021 adalah Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota sebesar 99,8%, program pengelolaan persampahan sebesar 99,3%, program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 99,90%. Sedangkan program dengan realisasi anggaran terendah pada tahun 2021 yaitu Program penanganan pengaduan lingkungan hidup sebesar 78,82%, dan program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional sebesar 74,27%.

Realisasi anggaran 2020 dan 2021 yang tidak mencapai target menunjukkan bahwa masih minimnya penyerapan dana anggaran kegiatan/program, untuk itu guna melihat apakah pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu telah ekonomis, efisien dan efektif, maka dibutuhkan pengukuran kinerja komprehensif.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kinerja dan Pengukuran Kinerja

Kinerja menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keluaran atau hasil dari program maupun kegiatan yang akan dan telah dicapai dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Menurut Mahsun (2017), kinerja adalah kondisi atau gambaran yang berhubungan dengan tingkat tercapainya suatu kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi sector publik yang tertuang dalam perumusan skema strategik planning. Menurut Sutrisno (2016) kinerja adalah hasil kerja karyawan dilihat dari aspek kualitas, kuantitas, waktu kerja, dan Kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Secara umum kinerja adalah suatu gambaran keberhasilannya organisasi sektor publik dalam mencapai tujuannya dalam periode tertentu.

Manfaat Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja Anggaran Realisasi sangat penting dalam menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Pengukuran kinerja anggaran realisasi yang handal juga merupakan salah satu kunci kesuksesan organisasi. Hal ini dikarenakan pengukuran kinerja dapat memotivasi manajer dan karyawan untuk mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan (Indriyawati, 2020).

Menurut Mardiasmo (2018) mempunyai beberapa manfaat, antara lain :

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen
2. Memberikan arahan untuk mencapai target kinerja yang telah diterapkan

3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
4. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi
5. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi
6. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif

Aspek-Aspek Pengukuran Kinerja

Ada 6 (enam) aspek dalam pengukuran kinerja menurut Mahsun (2017) yaitu:

1. Kelompok masukan (*input*) merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
2. Kelompok proses (*process*) merupakan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketetapan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
3. Kelompok keluaran (*output*) yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud (*tangible*) maupun tidak terwujud (*intangible*).
4. Kelompok hasil (*outcome*) merupakan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung.
5. Kelompok manfaat (*benefit*) yaitu sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan negatif.
6. Kelompok dampak (*impact*) yaitu pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negative.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan dana anggaran. Menurut Nordiawan & Hertianti (2018) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan pelaporan kinerja suatu instansi pemerintah untuk menginformasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran. Laporan ini menggambarkan keberhasilan maupun kegagalan yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah yang nantinya laporan ini akan dilaporkan setahun sekali kepada pihak yang berkepentingan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana anggaran yang telah ditetapkan

Value for Money

Berdasarkan pengertian *value for money* yang menyebutkan ada 3 elemen utama, yaitu ekonomis efektivitas, dan efisiensi maka menurut Basri (2018) ketiga indikator tersebut dikenal 3E, sebagai berikut:

1. Ekonomis

Ekonomis adalah hubungan antara pasar dan masukan (*cost of input*) dengan kata lain ekonomis merupakan praktik pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang memungkinkan (*spending less*).

Kriteria penilaian ekonomis adalah sebagai berikut:

Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($X < 100\%$) maka ekonomis.

Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($X = 100\%$) maka ekonomis berimbang atau cukup ekonomis.

Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($X > 100\%$) maka tidak ekonomis

2. Efisiensi

Efisiensi adalah suatu indikator yang menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya suatu unit organisasi dan keluaran yang dihasilkan indikator tersebut memberikan informasi tentang konversi masukan menjadi keluaran, yaitu efisiensi dari proses internal.

Kriteria penilaian efisien adalah sebagai berikut

Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($X < 100\%$) maka tidak efisien.

Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($X = 100\%$) maka efisien berimbang atau cukup efisien.

Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($X > 100\%$) maka efisien

3. Efektivitas

Efektivitas adalah suatu indikator yang menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dan keluaran (*output*) program dalam mencapai program.

Kriteria efektivitas adalah :

Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($X < 100\%$) maka tidak efektif.

Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($X = 100\%$) maka efektif berimbang atau cukup efektif.

Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($X > 100\%$) berarti efektif atau sangat efektif.

Hipotesis

Berdasarkan Telaah Pustaka diatas, maka penulis dapat menurunkan hipotesis yaitu : Kinerja Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Rokan Hulu diduga belum memenuhi prinsip value for money berdasarkan konsep ekonomis, efisiensi, dan efektivitas

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti suatu kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument, Teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna Sugiyono (2018). Teknis penelitian ini dilakukan dengan cara memperoleh data kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori yang relevan dengan permasalahan dalam pengambilan kesimpulan dan saran. Peneliti menggunakan metode ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Rokan Hulu apakah telah sesuai dengan konsep *value for money* dengan menggunakan elemen ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada. Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, dan *literatur review* lainnya.

Teknik Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif. Peneliti akan melakukan pengukuran kinerja keuangan melalui metode *value for money* dengan 3 elemen yang terkait yaitu ekonomis, efisien, dan efektivitas. Berdasarkan pengukuran ketiga elemen tersebut nantinya peneliti akan menjelaskan hasil perhitungan dan kemudian akan melakukan analisa dari hasil perhitungan yang telah dilakukan guna melihat apakah kinerja keuangan Dinas Lingkungan Hidup Rokan Hulu sudah baik atau belum. Data-data untuk menghitung ketiga elemen ini didapatkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Realisasi Anggaran Dinas lingkungan Hidup Rokan Hulu 2020-2021.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Aspek Ekonomis

Pada tahun 2020, terdapat 29 kegiatan dengan nilai perhitungan ekonomis Dibawah 100%. Berdasarkan kriteria ekonomis, maka 29 kegiatan ini dinyatakan Ekonomis. Ini menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kab Rokan Hulu telah mengeluarkan dana kurang dari anggaran yang telah ditetapkan Pada tahun 2020. Ini berarti Dinas Lingkungan Hidup Kab Rokan Hulu Telah menghemat di 29 kegiatan. Selain itu, terdapat 4 kegiatan yang memiliki Nilai perhitungan sebesar 100% yaitu kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan barang cetakan dan penggadaan, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional. Berdasarkan kriteria ekonomis, maka 4 kegiatan Ini dinyatakan ekonomis berimbang. Ini menunjukkan bahwa dana yang dikeluarkan pada kegiatan ini sesuai dengan anggaran yang telah rencanakan sebelumnya.

Pada tahun 2021, terdapat 13 kegiatan dengan nilai perhitungan ekonomis Dibawah 100%. Berdasarkan kriteria ekonomis, maka 13 kegiatan ini dinyatakan Ekonomis. Ini menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kab Rokan Hulu telah mengeluarkan dana kurang dari anggaran yang telah ditetapkan Pada tahun 2021. Ini berarti Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Telah menghemat di 13 kegiatan. Selain itu, terdapat 7 kegiatan yang memiliki nilai Perhitungan sebesar 100% yaitu Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota, Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan, Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Berdasarkan kriteria ekonomis, maka 7 kegiatan ini dinyatakan ekonomis berimbang. Ini menunjukkan bahwa dana yang dikeluarkan pada kegiatan ini sesuai dengan anggaran yang telah rencanakan sebelumnya.

Aspek Efisiensi

Pada tahun 2020, terdapat 10 kegiatan dengan nilai perhitungan efisiensi diatas 100%. Berdasarkan kriteria efisiensi, 10 kegiatan ini dinyatakan efisien. Ini Menunjukkan bahwa persentase fisik yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan melebihi persentase keuangan yang telah dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan Tersebut. Terdapat 13 kegiatan yang

memiliki nilai perhitungan efisien sama dengan 100% yaitu kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat, Penyediaan jasa kebersihan kantor, Penyediaan alat tulis kantor, Penyediaan barang cetakan dan pengadaan, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Rapat-rapat koordinasi dalam daerah, Penyediaan jasa tenaga teknis kantor, Penyediaan jasa keamanan kantor, Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan, Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional, Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan pencemaran lingkungan. Berdasarkan kriteria efisiensi, maka 13 kegiatan ini dinyatakan efisien berimbang. Ini menunjukkan bahwa persentase fisik yang dilakukan sesuai dengan persentase keuangan yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut. Kemudian terdapat 10 kegiatan yang memiliki nilai perhitungan efisiensi kurang dari 100% yaitu kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor, Penyediaan makanan dan minuman, Pengadaan perlengkapan gedung kantor, Pengadaan mebeleur, Pengadaan peralatan kerja, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, Pemantauan kualitas lingkungan, Penyelesaian pengaduan masyarakat mengenai dugaan pencemaran lingkungan hidup, Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan pencemaran lingkungan (DAK), Penyusunan dokumen informasi kinerja lingkungan hidup. Berdasarkan kriteria efisiensi, maka 10 kegiatan ini dinyatakan tidak efisien. Hal ini menunjukkan bahwa persentase fisik yang dilakukan kurang dari persentase keuangan yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut.

Pada tahun 2021, terdapat 11 kegiatan dengan nilai perhitungan efisiensi diatas 100%. Berdasarkan kriteria efisiensi, 11 kegiatan ini dinyatakan efisien. Ini Menunjukkan bahwa persentase fisik yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan melebihi persentase keuangan yang telah dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan Tersebut. Terdapat 6 kegiatan yang memiliki nilai perhitungan efisien sama dengan 100% yaitu kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Berdasarkan kriteria efisiensi, maka 6 kegiatan ini dinyatakan efisien Berimbang. Ini menunjukkan bahwa persentase fisik yang dilakukan sesuai dengan Persentase keuangan yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut. Terdapat 3 kegiatan yang memiliki nilai perhitungan efisiensi kurang dari 100% yaitu Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS, Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Berdasarkan kriteria efisiensi, maka 2 kegiatan ini Dinyatakan tidak efisien. Hal ini menunjukkan bahwa persentase fisik yang dilakukan kurang dari persentase keuangan yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kegiatan yang masih dibawah 100% dikarenakan timbunan sampah yang semakin banyak dimana meningkatnya jumlah penduduk membuat tingkat konsumsi masyarakat bertambah. Kapasitas pelayanan yang masih cukup terbatas yang mana prioritas pendanaan dan pemenuhan sumber daya manusia yang belum sebanding dengan kebutuhan pelayanan. Program yang masih belum mencapai target efisien, ini menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu belum mampu menggunakan sumber daya yang diperlakukan dengan sebaik mungkin untuk mencapai target maksimal.

Aspek Efektivitas

Pada Tahun 2020 perhitungan efektivitas pada seluruh program/ kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu adalah sebesar 93%. Berdasarkan kriteria penilaian efektivitas yang telah ditetapkan maka pada tahun 2020 program atau kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu dinyatakan tidak efektif. Hal serupa pun terjadi pada tahun 2021 dimana perhitungan rasio efektivitas adalah sebesar 59% dengan kriteria penilaian dinyatakan tidak efektivitas. Hasil perhitungan rasio efektivitas ini menunjukkan bahwa dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 34% yang berarti bahwa DLH Kabupaten Rokan Hulu mengalami penurunan kinerja dalam mencapai target sasaran yang telah ditentukan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Suatu program atau kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut telah mencapai tujuan dari sasaran akhir yang ditetapkan. Dengan asumsi bila capaian kinerja yang dicapai lebih besar dari yang ditargetkan maka rasio efektivitas yang dihasilkan juga akan semakin besar dan begitu juga sebaliknya. Dalam perhitungan efektivitas pada tahun 2020 dan 2021 kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan hulu adalah kurang baik disebabkan belum memenuhi kategori efektivitas yaitu pencapaian target atas program/kegiatan yang dilaksanakan. Perlu diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu ini merupakan organisasi sektor publik yang memiliki tujuan untuk memberikan manfaat (benefits) kepada masyarakat bukan untuk mencari laba (profit), maka dari itu untuk menilai suatu efektivitas perlu dilihat apakah manfaat tersebut juga sudah dapat dirasakan oleh masyarakat. Capaian efektivitas dibawah 100% menunjukkan bahwa realisasi hasil/keluaran yang dilakukan tidak mencapai ekspektasi hasil/keluaran yang diharapkan oleh instansi/dinas. Pada kriteria efektivitas tahun 2020 terdapat 2 program yang menghasilkan presentase cukup signifikan yaitu program Jumlah Kasus lingkungan yang dapat di selesaikan dengan rasio 466,67% dan Jumlah IPAL pemrakarsa yang diawasi terhadap dokumen izin lingkungan 238,89%, ini menunjukkan program tersebut berhasil diselesaikan pada periode yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021 terdapat program yang hanya menghasilkan presentase sebesar 62,35% yaitu program jumlah usaha / kegiatan yang di pantau kualitas air dan air limbah, ini menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu tidak mampu dalam menyelesaikan target kegiatan atau yang telah ditetapkan sehingga terjadi beberapa proyek fisik yang tidak dapat direalisasikan pada periode yang telah ditetapkan. Hal ini juga disebabkan ketidakjelasan biaya yang dikeluarkan dalam proses persetujuan dan penilaian dokumen lingkungan untuk syarat penerbitan persetujuan lingkungan ini karena belum ada peraturan pemerintah yang mengatur secara jelas berapa tarif yang harus dikeluarkan oleh pemrakarsa dalam proses pengurusan persetujuan lingkungan tersebut serta minimnya konsultan penyusun dokumen AMDAL di Kabupaten Rokan Hulu. Dapat dilihat dari perhitungan ketiga elemen value for money diatas bahwa kinerja Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020 dan tahun 2021 belum memenuhi prinsip value for money.

PENUTUP

Berdasarkan analisis data yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020 dan 2021 dilihat dari segi aspek ekonomis menunjukkan

persentase nilai 72% dan 93,32%, maka dapat dikatakan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu bersifat ekonomis.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Rokan Hulu pada tahun 2020 dan 2021 dilihat dari segi aspek efisiensi menunjukkan persentase nilai 131% dan 101,77%, maka dapat dikatakan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu bersifat efisien.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020 dan 2021 dilihat dari segi aspek efektivitas menunjukkan persentase nilai 93 dan 59%, maka dapat dikatakan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu bersifat tidak efektivitas.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu diharapkan dapat mengevaluasi kembali program kegiatannya agar dapat memenuhi elemen value for money sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Amran Manurung, & Sihombing, H. (2018). Analisis Laporan Keuangan (Sektor Swasta dan Pemerintahan Daerah). Universitas HKBP Nommensen.
- Ardila, I. (2015). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value for Money pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 15.
- Arinda, F. (2021). Analisis Value for Money pada kinerja keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau. Pekanbaru.
- Basri, Y. M. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Universitas Riau.
- Bastian, I. (2019). Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia. Salemba Empat.
- Dwinanda, Y. (2018). Analisis *Value For Money* Dalam Pengukuran Kinerja Pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2018). Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat.
- Hastthoro, H. A. (2016). Tata Kelola Publik dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Janabadra Yogyakarta*, 56.
- Indriyawati. (2020). Analisis Kinerja Berbasis Balanced Scorecard pada Koperasi Simpan Pinjam Titian Umat Sejahtera. Semarang.
- Khalimatus, S., W, S., & A, R. (2016). Analisis value for money dalam Pengukuran Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Riset*, 9–20.
- Mahmudi. (2015). Manajemen Kinerja Sektor Publik. UPP STIM YKPN.
- Mahsun. (2017). Pengukuran Kinerja Sektor Publik (Edisi Pert). BPF.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru. Andi.
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2018). Akuntansi Sektor Publik Edisi 2. Salemba Empat.
- Pratiwi, A. I., & Nursandia, E. (2017). Analisis Pengukuran Kinerja Value For Money Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 11.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Alfabeta.
- Sutrisno. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia. Media Group.
- Triniyati. (2018). Analisis kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Simalingun Dengan pendekatan Value for Money Periode 2015-2017.

Zulhelmy, H., & Arif, E. (2021). Analisis Value for Money pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi Riau. *Journal Economics, Accounting and Business*, 1, 198–211.